

## **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET PERUSAHAAN GUNA PENYUSUNAN NERACA PADA KANTOR PERWAKILAN SKK MIGAS WILAYAH PAPUA DAN MALUKU DI SORONG**

**Jordan Tiblola**

Universitas Victory Sorong

*jordantiblola@gmail.com*

### **Abstrak**

*Fixed assets are one of several conditions that can support the company's operations. With sufficient assets, the operational activities of a company can run well. Otherwise, without sufficient fixed assets, the company's activities will be disrupted so that it will affect the company's performance. In general, it can be said that fixed assets belong to the company which are obtained not by trading but are used for the company's operational activities and have benefits for more than one year or one period. Decision makers will really need an asset information tool in the form of a list of fixed assets and accumulated data presented in financial reports. Therefore, presentation and fixed assets must be adequate in accordance with financial accounting standards. In this study, because the data are presented in a descriptive form and describe what is contained in the Papua and Maluku Region SKK Migas Representative Offices, the problem analysis uses a qualitative method. Where after the data is obtained and processed, the data is analyzed and compared to then describe how far the suitability is.*

**Keyword:** *Company Operations, Company Assets, Balance Sheet.*

## **PENDAHULUAN**

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa syarat yang dapat mendukung operasional dari perusahaan. Dengan aset tetap yang memadai maka kelancaran aktivitas operasional dari suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, tanpa aset tetap yang memadai maka aktivitas perusahaan akan terganggu sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa aset tetap merupakan harta milik perusahaan yang material dan diperoleh bukan dengan tujuan diperjual belikan melainkan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode. Aset tetap dari suatu perusahaan merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Untuk memaksimalkan peranan tersebut, aset tetap harus diberikan perhatian yang memadai serta dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam

pengelolaan aset tetap. Para pengambil keputusan akan sangat memerlukan alat informasi aktiva tetap berupa daftar aset tetap dan akumulasi penyusutannya yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penyajian dan pengungkapan aset tetap harus memadai sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pengelolaan perusahaan milik negara dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana perusahaan pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan BUMN yang ada di daerah kepada BUMN pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut, maka pemerintah memberi otonomi kepada daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung terciptanya good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan informasi pengelolaan keuangan perusahaan dan reformasi keuangan negara. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah dan perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah maupun BUMN. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas serta akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN yang ada di daerah sehingga good governance dapat tercapai.

Peraturan pemerintah yang ditetapkan tersebut, menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak, khususnya pihak-pihak diluar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi tersebut jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Peraturan pemerintah yang ditetapkan tersebut, menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak, khususnya pihak-pihak diluar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami

informasi tersebut jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Peraturan pemerintah yang ditetapkan tersebut, menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak, khususnya pihak-pihak diluar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi tersebut jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Aset Perusahaan**

Akuntansi menurut AICPA (American Institute Of Certified Public Accounting) adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang serta interpretasi dari hasil proses tersebut” (Lubis, 2010 : 2). Akuntansi menurut AICPA (American Institute Of Certified Public Accounting) adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang serta interpretasi dari hasil proses tersebut” (Lubis, 2010 : 2). Aset menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) adalah “kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah lalu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang meliputi proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan” (Harahap, 2011 :210).

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Jenis-jenis aset tetap menurut Mandala dan Nurdiawan (2007: 230), terdiri dari :

1. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan oprasional entitas dan dalam kondisi siap pakai. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya maka pencatatan antara bangunan dan lahan (tanah) harus dipisahkan. Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan atau konstruksi yang dapat meningkatkan nilai lahan itu sendiri, maka pencatatannya dapat digabungkan dengan nilai lahan.

2. Gedung, dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kondisi siap pakai.
3. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu.
4. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan irigasi, dan jaringan yang di bangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.
6. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional entitas pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

### **Perlakuan Akuntansi Aset Perusahaan**

Kriteria pertama dipenuhi apabila tingkat kepastian aliran manfaat ekonomi pada saat pengakuan awal. Pada umumnya kriteria ini di penuhi apabila risiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima oleh perusahaan. Aset tetap yang diperoleh dari pasar dapat memenuhi kriteria kedua dengan mudah akibat adanya transaksi eksternal. Untuk aset tetap yang dibangun secara internal, pengukuran secara andal terhadap biaya yang timbul dalam pembangunan tersebut juga seringkali telah tersedia. Menurut Mustaim (2013: 402), manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tetap adalah potensi dari aset tetap memberikan sumbangan kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan, atau berbentuk suatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas, atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternate. Kriteria kedua untuk pengakuan dapat dilihat pada bukti transaksi pembelian aset. Dalam keadaan aset tetap yang dikonstruksi sendiri, pengukuran dapat diandalkan atas biaya yang dibuat dari transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan input lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

### **Pengukuran Biaya Perolehan**

Dalam PSAK 16 Aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang Dalam PSAK 16 Aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Dalam hal pengukuran baik PSAK No 16 maupun SAP No 71 hampir sama. Hanya saja PSAK No 16 secara tegas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Biaya tersebut diakui dalam laba rugi saat terjadinya. Revaluasi dilakukan dengan teratur dan cukup umum agar dapat dipastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Untuk tanah dan bangunan, nilai wajarnya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang sudah profesional berdasarkan bukti pasar (PSAK No 16 paragraf 32). Sedangkan untuk pabrik dan peralatan biasanya dicatat sebesar nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Sedang dalam PSAP No 07 paragraf 59 tidak mengakui adanya revaluasi sebab penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak di perkenankan karena SAP menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

## **METODE**

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

1. Metode Observasi (pengamatan), dilakukan dengan mendatangi Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku di Sorong untuk mengamati secara langsung aktivitas kerja yang dilakukan dalam kantor perwakilan tersebut.
2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengambil atau mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berhubungan penyusunan neraca dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengambil atau mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berhubungan penyusunan neraca dalam laporan keuangan perusahaan

### **Metode Analisis Data**

Setelah data-data yang diperoleh dari pengumpulan data. maka langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data adalah cara atau langkahlangkah untuk mengolah data primer maupun data sekunder yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam penelitian ini karena data-data yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan menggambarkan apa yang terdapat di Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, maka analisis permasalahan menggunakan metode kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Klasifikasi Aset Dalam Neraca Kantor Perwakilan SKK Migas**

Pos-pos aset yang disajikan dalam neraca Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar, merupakan aset yang dapat dipakai atau dimiliki dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas, merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan logam. Sedangkan saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Persediaan, merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam waktu dua belas (12) bulan dari tanggal pelaporan.
2. Aset Tetap, mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan perusahaan.

Dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh perusahaan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, Perlakuan Akuntansi terhadap aset perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar
2. Aset Tetap

### **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Perusahaan dalam Penyusunan Neraca Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan milik negara, sehingga SAP ini dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan milik negara khususnya SKK Migas dalam membuat laporan pertanggung jawaban. Dengan menggunakan SAP, maka laporan keuangan perusahaan diharapkan lebih informatif dan pemakai laporan keuangan dapat menilai akuntabilitas atas perolehan dan pemanfaatan sumber daya. Analisa terhadap aset Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku adalah :

1. Kas.

Menurut SAP, akun kas yang disajikan di neraca terdiri dari kas di kas perusahaan, kas di bendahara penerima, dan kas di bendahara pengeluaran. Kas dicatat di neraca sebesar nilai nominal. Akun kas yang terdapat di neraca Kantor Perwakilan SKK Migas, terdiri dari kas umum perusahaan dan kas di bendahara pengeluaran.

2. Piutang

Menurut SAP, akun piutang yang disajikan di neraca terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara lain, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah lain, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi perusahaan, dan piutang lainnya.

3. Persediaan

Menurut SAP, persediaan yang disajikan di neraca hanya terdiri dari satu akun saja yaitu persediaan dan dinilai berdasarkan harga perolehan. Pengungkapan persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur tentang persediaan. Neraca Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, hanya menyajikan satu akun persediaan saja.

4. Aset Tetap.

Menurut SAP aset tetap dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mengalami penyusutan yang nilainya dicatat dalam akun pada pos aset tetap. Sedangkan dalam neraca Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, aset tetap berupa peralatan dan mesin dicatat berdasarkan harga perolehan dan mengalami penyusutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan keuangan Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku menggunakan dasar kas menuju akrual (cash basis toward accrual), dimana penyusunan neraca Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Perlakuan akuntansi aset perusahaan dalam Neraca Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bahwa kas, piutang, persediaan, serta aset tetap sesuai dengan Perlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Aset tetap yang dikelola Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku hanya berupa Peralatan dan Mesin dan bukan dengan tujuan diperjual belikan melainkan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode.

## **SARAN**

1. Kiranya apa yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku terhadap penyusunan laporan keuangan terutama yang menyangkut perlakuan akuntansi aset perusahaan dapat dilakukan klasifikasi dalam pencatatannya, sehingga penyusunan laporan keuangan benar-benar akuntabel dan transparan.
2. Perlu adanya pemberlakuan akuntansi aset pada Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, sehingga dapat diketahui seberapa banyak aset yang dimiliki Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lubis, (2010), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI, Press, Jakarta
- Harahap, (2011), Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Harahap, (2011 : 210), Aset menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) PSAK No 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan



- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Juan dan Triwahyuni, 2013, Akuntansi Perusahaan, Dalam Aplikasi dan Implementasi, Penerbit, Salemba Empat, Jakarta
- Mandala dan Nurdiawan, 2007, Akuntansi Aset Perusahaan Dalam Praktek, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Mustaim, 2013, Akuntansi Manajemen, Penerbit Bina Pustaka, Jakarta
- S. Munawir, 2005, Analisa Laporan Keuangan Perusahaan, Penerbit Alfabetha, Bandung
- Zaki Baridwan, 2011, Pengantar Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Halim, 2004, Neraca Dalam Analisa Laporan Keuangan Perusahaan, Penerbit Andi Offset, Jakarta